

BAB I

PENDAHULUAN

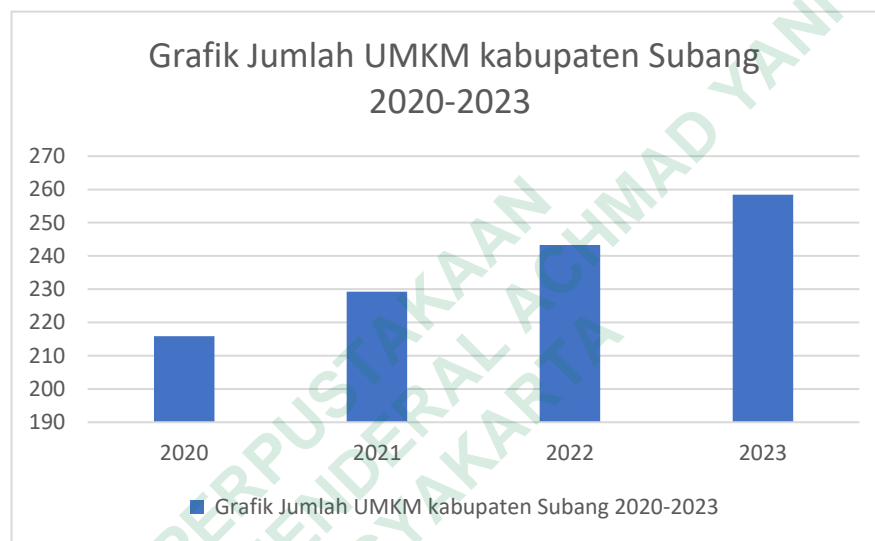
A. Latar Belakang

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam perekonomian suatu negara, terutama di Indonesia. UMKM adalah kegiatan usaha yang dijalankan oleh individu atau sekelompok orang dengan menggunakan modal yang dimiliki sendiri yang bertujuan memperoleh keuntungan serta mengembangkan proses bisnis secara fleksibel (Safitri, Sriyunianti, and Chandra, 2023). Keberadaan UMKM terbukti mampu bertahan meskipun menghadapi berbagai tantangan ekonomi, seperti yang terlihat pada masa pandemi COVID-19 sektor ini tetap berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Kontribusinya sebanyak lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan menyerap hampir 97% tenaga kerja (Ekon, 2022).

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan bentuk kegiatan ekonomi yang bersifat mandiri yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Pelaku usaha ini dapat berupa perorangan atau badan usaha yang tidak tergantung pada entitas usaha lain, tidak berafiliasi dengan usaha berskala besar maupun menengah serta bukan merupakan bagian dari jaringan usaha yang lebih besar. Berdasarkan informasi dari Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM di Indonesia pada tahun 2024 telah mencapai 65,4 juta unit yang tersebar di berbagai sektor. Jumlah tersebut menunjukkan peran besar UMKM dalam perekonomian nasional, salah satunya melalui penyerapan tenaga kerja sebanyak 123,3 ribu orang yang turut berkontribusi dalam menurunkan angka pengangguran. Setiap tahun jumlah UMKM terus mengalami peningkatan termasuk di Kabupaten Subang. Kabupaten Subang merupakan salah satu wilayah yang berada di Provinsi Jawa Barat dengan luas sekitar 2.052 km² dan jumlah penduduk sekitar 1.529.000 jiwa (BPS Subang, 2023). Menurut Mulyati et al (2024) menyatakan bahwa Kabupaten Subang merupakan salah satu wilayah yang memiliki banyak UMKM di Provinsi Jawa Barat. Potensi sektor UMKM di

Kabupaten Subang dapat dilihat dari peningkatan jumlah pelaku usaha yang terus berkembang serta kontribusinya yang signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di daerah tersebut (Iciah and Kurniawan, 2020). Perkembangan UMKM di Kabupaten Subang dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 1.1
Perkembangan data usaha Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Subang



Sumber : (Jabar Digital Service, 2023)

Jika dilihat dari grafik tersebut menunjukkan tren peningkatan jumlah UMKM di Kabupaten Subang dari tahun 2020 hingga 2023. Tren peningkatan ini terus berlanjut pada tahun 2022 dan mencapai puncaknya pada tahun 2023 mencerminkan pertumbuhan yang signifikan dalam sektor UMKM di daerah tersebut. Namun, meskipun tren ini menunjukkan pertumbuhan yang signifikan tantangan seperti pengelolaan keuangan, akses terhadap modal yang terbatas serta persaingan yang semakin ketat tetap menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan agar UMKM dapat bertahan dan berkembang secara berkelanjutan (Mulyati et al., 2024).

Perkembangan UMKM sangat memberikan dampak yang positif untuk perekonomian dan mampu menyumbang 60% dari PDB (Rahmadani, 2022). Meskipun UMKM memberikan dampak positif terhadap perekonomian, tidak lepas dari permasalahan keuangan yang harus dihadapi. Salah satu

permasalahan utama yang dihadapi oleh pelaku UMKM adalah pengelolaan keuangan yang kurang optimal (Iciah & Kurniawan, 2020). Pengelolaan keuangan meliputi berbagai aktivitas manajerial seperti perencanaan, analisis dan pengendalian keuangan (Hirawati et al., 2021). Banyak pelaku UMKM masih mencampurkan keuangan usaha dengan keuangan pribadi, karena menganggap bisnis mereka masih berskala kecil dan bersifat usaha keluarga. Mereka tidak memiliki gambaran yang jelas tentang besaran keuntungan maupun laba bersih yang didapat, sehingga kondisi finansial usaha tidak dapat dipantau secara optimal (banten.bisnis.com). Banyak pelaku UMKM beranggapan bahwa pendapatan dari usaha dapat langsung digunakan untuk kebutuhan sehari-hari yang dapat mengakibatkan masalah keuangan di masa depan. Sejalan dengan penelitian terdahulu di Kabupaten Subang mengenai permasalahan pengelolaan keuangan yang belum optimal (Layyinaturrobaniyah & Muizu, 2017). Kurangnya pemahaman dalam mengelola keuangan mencerminkan lemahnya perencanaan keuangan di kalangan pelaku UMKM yang berpotensi memengaruhi kelangsungan usaha mereka (Mostapha et al., 2021).

Perencanaan keuangan sering kali dianggap tidak penting dan disepelekan oleh pelaku usaha. Menurut Yerianto dan Mustaqim (2024), merancang perencanaan keuangan merupakan langkah esensial yang seharusnya dilakukan, terutama oleh para pelaku usaha. Proses ini mencakup pengumpulan informasi finansial, penetapan tujuan hidup atau target yang ingin dicapai serta penyusunan strategi berdasarkan kondisi keuangan saat ini guna merealisasikan tujuan tersebut (Bonang, 2019). Perencanaan keuangan berfungsi tidak hanya sebagai instrumen pengendalian keuangan pribadi, tetapi juga sebagai upaya preventif dalam menghindari akumulasi utang yang berlebihan. Selain itu, perencanaan ini juga berfungsi untuk mengatur pengeluaran secara efisien serta menyusun strategi jangka panjang dalam mendukung pengembangan bisnis.

Masalah pengelolaan keuangan juga diperburuk dengan rendahnya akses UMKM terhadap sumber permodalan, karena kesulitan dalam memenuhi

persyaratan pengajuan kredit serta kondisi usaha yang tidak memenuhi kriteria kelayakan untuk mendapatkan pembiayaan dari perbankan (Astuti & Soleha, 2023); (Setya Aqida & Fitria, 2019). Hal tersebut karena masih banyak pelaku UMKM yang belum melakukan pengelolaan keuangan dengan baik (Astuti & Soleha, 2023). Berdasarkan data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) yang dilakukan pada tahun 2024, tercatat bahwa indeks inklusi keuangan di Indonesia mencapai 76,19% (ojk.go.id). Angka ini mencerminkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat Indonesia terhadap berbagai produk dan layanan jasa keuangan yang disediakan oleh lembaga keuangan formal relatif tinggi. Namun, besarnya penyaluran kredit UMKM masih berkutat di angka 20% (kominfo.go.id, 2024). Hal tersebut karena masih banyak pelaku UMKM yang belum melakukan pencatatan keuangan. Inklusi keuangan sendiri merujuk pada hak setiap individu untuk memiliki akses yang luas dan mendapatkan layanan dari lembaga keuangan yang mencakup aspek ketersediaan, kenyamanan, informasi yang jelas serta biaya yang terjangkau (Aqida & Fitria, 2019).

Selain itu, faktor psikologis seperti *locus of control* juga berperan dalam bagaimana UMKM mengelola keuangan mereka (Budiasni & Ferayani, 2023). *Locus of control* merujuk pada keyakinan seseorang terhadap kemampuannya dalam mengontrol berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pengelolaan keuangan (Aini & Rahayu, 2022). Ketidakmampuan dalam mengontrol keuangan pribadi termasuk salah satu permasalahan. Ketika individu meyakini bahwa dirinya tidak memiliki kendali yang besar terhadap situasi yang ia alami, maka ia cenderung memiliki *locus of control eksternal* (Atikah & Kurniawan, 2021). Individu meyakini bahwa dirinya tidak memiliki kendali yang besar terhadap situasi yang ia alami, maka ia cenderung memiliki *locus of control eksternal*. Pelaku usaha dengan *locus of control internal* yang baik cenderung lebih mampu mengatur pengeluaran dan menyusun anggaran dengan bijak (Aini & Rahayu, 2022). Kebiasaan buruk yang tanpa disadari dapat menimbulkan pengeluaran yang berlebihan dan menjadikan keuangan pribadi tidak terkontrol (Atikah & Kurniawan, 2021). Keadaan tersebut dapat

menjadikan pengelolaan keuangan yang kurang baik, menghambat UMKM untuk berkembang dan cenderung stagnan di zona nyaman mereka.

Berkembangnya UMKM dibutuhkan upaya peningkatan pengelolaan keuangan dengan baik dan benar, pemahaman terhadap literasi keuangan sangat dibutuhkan oleh para pelaku UMKM di Kabupaten Subang (Kartini et al., 2024). Menurut Otoritas Jasa Keuangan (2018), literasi keuangan mencakup pemahaman, kepercayaan dan keterampilan yang berperan dalam membentuk sikap serta perilaku individu dalam mengelola keuangan. Hal ini berpengaruh pada kualitas pengambilan keputusan keuangan yang lebih baik guna mencapai kesejahteraan. Berdasarkan hasil SNLIK tahun 2024 indeks literasi keuangan di Indonesia mencapai 65,43% yang menunjukkan bahwa masih ada 34,57% masyarakat belum memiliki pemahaman keuangan yang memadai. Literasi keuangan yang rendah dapat menyebabkan individu lebih rentan dalam pengambilan keputusan keuangan yang kurang tepat, seperti penggunaan dana yang tidak produktif atau kesulitan dalam mengelola keuangan (Susanti et al., 2018).

Tingkat literasi keuangan yang rendah dapat menyebabkan individu cenderung mengalokasikan dananya untuk kebutuhan konsumtif, melakukan pinjaman serta menanggung beban bunga dari pinjaman tersebut (Safitri et al., 2023). Oleh karena itu, kemampuan literasi keuangan menjadi aspek yang krusial dalam memengaruhi pengambilan keputusan keuangan. Literasi keuangan juga memiliki hubungan erat dengan stabilitas ekonomi, karena kontribusinya dalam memperkuat perputaran ekonomi secara keseluruhan. Penelitian yang dilakukan oleh Santiara dan Sinarwati (2023) menunjukkan adanya hubungan positif antara literasi keuangan dengan kemampuan pengelolaan keuangan pada pelaku UMKM. Artinya, semakin tinggi tingkat literasi keuangan yang dimiliki, semakin optimal pula kemampuan pelaku usaha dalam mengelola keuangan.

Beberapa penelitian terdahulu telah dilakukan mengenai pengaruh perencanaan keuangan yang dilakukan oleh Susanti et al (2018), Yerianto & Mustaqim (2024), Susanti et al (2018) perencanaan keuangan berpengaruh

positif terhadap perilaku keuangan UMKM. Salah satu dimensi yang memengaruhi perencanaan keuangan adalah penetapan tujuan keuangan oleh pelaku usaha, baik untuk jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Penelitian lain tentang pengaruh inklusi menunjukkan inklusi keuangan berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan UMKM (Kusumaningrum et al., 2023). Hal ini berbanding terbalik dengan *locus of control* belum konstan terhadap hasil penelitiannya. Menurut (Atikah & Kurniawan, 2021) hasilnya positif sedangkan didapat hasil negatif terhadap pengelolaan keuangan UMKM (Astuti & Soleha, 2023).

Pengelolaan keuangan yang dipengaruhi beberapa faktor telah banyak diteliti sebelumnya. Dalam penelitian ini faktor tersebut telah sejalan dengan *Teori Planned Behavior* (TPB), teori ini menjelaskan bahwa perilaku individu didasarkan pada keyakinan yang diyakini mampu mendorong seseorang untuk melakukan tindakan tertentu secara spesifik (Iciah & Kurniawan, 2020). Berdasarkan teori tersebut dikatakan bahwa keyakinan dan penilaian individu terhadap suatu perilaku mempengaruhi sikap mereka terhadap perilaku tersebut (Fishbein & Ajzen, 1977). Sehingga pada penelitian ini perencanaan keuangan, inklusi keuangan, *locus of control* dan pemahaman literasi keuangan diperlukan oleh UMKM Kabupaten Subang. Teori ini adalah suatu teori sosial yang berfungsi untuk memprediksi perilaku manusia dengan penekanan pada fakta bahwa keputusan yang diambil dalam suatu perilaku merupakan hasil dari proses penalaran yang dipengaruhi oleh sikap, norma dan kontrol terhadap perilaku yang pada gilirannya akan mempengaruhi cara pengelolaan keuangan dalam UMKM (Rahman et al., 2020).

Berbeda dari penelitian sebelumnya yang cenderung menganalisis variabel secara terpisah. Penelitian ini menempatkan literasi keuangan sebagai variabel moderasi yang memengaruhi kekuatan hubungan antara perencanaan keuangan, inklusi keuangan dan *locus of control* dengan perilaku pengelolaan keuangan UMKM. Penelitian ini dilakukan karena pengelolaan keuangan yang baik merupakan faktor krusial dalam menjaga keberlanjutan dan pertumbuhan UMKM, khususnya di Kabupaten Subang yang memiliki potensi ekonomi

besar. Namun, UMKM di wilayah ini masih menghadapi berbagai tantangan dalam pengelolaan keuangan (Kartini et al., 2024). Rendahnya tingkat literasi, keterbatasan akses terhadap layanan keuangan formal serta pengaruh faktor psikologis seperti *locus of control*. Ketiga aspek tersebut dapat memengaruhi kemampuan UMKM dalam merencanakan dan mengelola keuangan mereka secara efektif. Menurut Hanum et al., (2019) pengelolaan keuangan merupakan salah satu elemen kunci yang berperan penting dalam mendukung perkembangan dan kemajuan UMKM.

Mempertimbangkan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh pelaku UMKM, diperlukan analisis yang lebih mendalam terhadap pengaruh perencanaan keuangan, inklusi keuangan dan *locus of control* terhadap perilaku pengelolaan keuangan. Dalam konteks tersebut, literasi keuangan berperan sebagai variabel moderasi yang akan memperkuat atau memperlemah hubungan antar variabel. Oleh karena itu, penelitian ini diberi judul: “Peran Literasi Keuangan dalam Memoderasi Pengaruh Perencanaan Keuangan, Inklusi Keuangan dan *Locus of Control* terhadap Perilaku Pengelolaan Keuangan pada UMKM di Kabupaten Subang.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan masalah yang akan terbentuk dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Apakah perencanaan keuangan berpengaruh positif terhadap perilaku pengelolaan keuangan UMKM Kabupaten Subang?
2. Apakah inklusi keuangan berpengaruh positif terhadap perilaku pengelolaan keuangan UMKM Kabupaten Subang?
3. Apakah *locus of control* berpengaruh positif terhadap perilaku pengelolaan keuangan UMKM Kabupaten Subang?
4. Apakah literasi keuangan dapat memoderasi pengaruh perencanaan keuangan terhadap perilaku pengelolaan keuangan UMKM Kabupaten Subang?
5. Apakah literasi keuangan dapat memoderasi pengaruh inklusi keuangan terhadap perilaku pengelolaan keuangan UMKM Kabupaten Subang?

6. Apakah literasi keuangan dapat memoderasi pengaruh *locus of control* terhadap perilaku pengelolaan keuangan UMKM Kabupaten Subang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pengaruh perencanaan keuangan terhadap perilaku pengelolaan keuangan UMKM di Kabupaten Subang
2. Mengetahui pengaruh inklusi keuangan terhadap perilaku pengelolaan keuangan UMKM di Kabupaten Subang
3. Mengetahui pengaruh *locus of control* keuangan terhadap perilaku pengelolaan keuangan UMKM di Kabupaten Subang
4. Mengetahui literasi keuangan dapat memoderasi (memperkuat) pengaruh perencanaan keuangan terhadap perilaku pengelolaan keuangan UMKM Kabupaten Subang?
5. Mengetahui literasi keuangan dapat memoderasi (memperkuat) pengaruh inklusi keuangan terhadap perilaku pengelolaan keuangan UMKM Kabupaten Subang?
6. Mengetahui literasi keuangan dapat memoderasi (memperkuat) pengaruh *locus of control* terhadap perilaku pengelolaan keuangan UMKM Kabupaten Subang?

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Akademis

Penelitian diharapkan dapat menjadi wadah untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama jenjang perkuliahan serta dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu referensi terkait mengenai pengelolaan keuangan yang dipengaruhi oleh 3 variabel yaitu Perencanaan keuangan, inklusi keuangan dan locus of control. Satu sebagai variabel moderasi yaitu Literasi Keuangan.
- b. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi para pelaku UMKM dalam melaksanakan pengelolaan keuangan mereka dengan baik dan benar sesuai standar.

E. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Lingkup penelitian ini mencakup para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang beroperasi di wilayah Kabupaten Subang, Jawa Barat. Berdasarkan identifikasi masalah dan tujuan penelitian, batasan penelitian ini mencakup variabel perencanaan keuangan, inklusi keuangan serta *locus of control* dengan literasi keuangan sebagai variabel moderasi.